

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu konsep yang mengedepankan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional secara menyeluruh. Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk menyelenggarakan dan mengurus kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengantarkan era baru penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu pemberian otonomi yang mutlak, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah (Darmawan, 2016).

Sebagai salah satu organisasi sektor publik, pemerintah daerah diharapkan selalu bertindak untuk kepentingan publik. Karena sifat tersebut, keterbukaan, akuntabilitas, dan kualitas hasil pelayanan pemerintah daerah akan terus menjadi perhatian publik. Sedangkan kinerja aparatur atau manajerial di lingkungan instansi pemerintah daerah akan mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan program kerja suatu daerah. Perbandingan terhadap anggaran digunakan untuk mengukur/mengetahui keefektifan kinerja dari suatu organisasi (Oktaviana, 2019).

Salah satu organisasi sektor publik yang dipercayakan untuk mengawasi anggaran daerah adalah pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan pemda ialah untuk kepentingan warga. Akibatnya, pemerintah daerah harus bekerja secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, pemerintah daerah harus memberikan pelayanan yang paling efisien dan efektif kepada masyarakat (Hakim, 2016).

Salah satu kunci keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan kewajibannya di pemerintahan daerah adalah kinerja manajerialnya, karena pemerintahan yang efektif dipengaruhi oleh kinerja yang baik. Evaluasi kinerja manajerial SKPD sangat penting karena akan membantu optimalisasi pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan sektor publik

untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik (Amertadewi dan Dwirandra, 2013). Akuntabilitas publik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial. Menurut Mardiasmo (2011), akuntabilitas publik adalah tugas agen untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, memantau, dan mengungkapkan semua tindakan dan aktivitas yang berada di bawah kendalinya kepada *principal* yang memiliki hak dan kewenangan atas tanggung jawab tersebut. Akuntabilitas publik tentunya akan meningkatkan kinerja manajerial karena semakin tinggi jumlah akuntabilitas atas semua kegiatan yang dilakukan, semakin baik kinerja dalam mencapai tujuan organisasi (Darmawan, 2016).

Hasil penelitian Sari (2014), Astini (2014), dan Melia (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Wahyuni (2014) dan Nugraha (2015), yang menemukan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Desentralisasi adalah aspek lain yang mempengaruhi kinerja manajerial. Desentralisasi, menurut Marina (2009), merupakan pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab kepada manajer. Derajat delegasi mencerminkan sejauh mana manajemen atas mendorong bawahan untuk membuat keputusan kebijakan sendiri. Menurut Mardiasmo (2001), desentralisasi tidak hanya meliputi pengalihan kekuasaan asal pemerintah pusat kepada pemerintahan yang lebih luas, namun juga pengalihan kewenangan beberapa instansi pemerintah tertentu kepada swasta melalui privatisasi. Karena kondisi administratif, tugas, dan kewajiban yang semakin kompleks, maka diperlukan desentralisasi berbentuk pelimpahan tugas dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Sebagai hasil dari pendelegasian kekuasaan, para pejabat tinggi akan dibebaskan dari sebagian tanggung jawab mereka (Darmawan, 2016).

Hasil penelitian Wahyuni (2014), menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berbeda dengan hasil penelitian Nugraha (2015) yang menunjukkan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut Sumarno (2005), mendefinisikan komitmen organisasi sebagai dorongan internal untuk melakukan segala sesuatu untuk mendorong kemajuan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan mengutamakan kepentingan organisasi. Keterikatan afektif dan kemauan untuk mewakili organisasi adalah dua karakteristik keterlibatan organisasi. Dengan demikian, komitmen organisasi dapat digambarkan sebagai rasa ketertarikan dan keinginan individu untuk menjadi bagian dari suatu organisasi, serta keinginan untuk meningkatkan arah organisasi (Aini, 2016).

Hasil penelitian Pandelaki dan Poputra (2013), Praja (2015), Nurlelahayati (2017), dan Annisa (2020) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berbeda dengan hasil penelitian Andina (2013) dan Suhanda (2018) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kinerja manajerial, menurut Putri (2010), adalah kinerja individu anggota perusahaan atau organisasi dalam tugas-tugas manajerial seperti persiapan, investigasi, komunikasi, penilaian, manajemen, kepegawaian, negosiasi, representasi, dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan ringkasan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebagai pengembangan visi, tujuan, dan strategi oleh instansi pemerintah daerah yang berimplikasi pada tingkat kemajuan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah (Sedarmayanti, 2004). Kinerja manajerial sesuai pandangan islam surat Al-ahqaaf ayat 19:

يُظَلْمُونَ لَا وَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَيُؤْفِقِيهِمْ عَمَلُوا مِمَّا دَرَجَتْ وَلِكُلِّ

Artinya: *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”*.

Menurut ayat di atas, setiap aktivitas manusia niscaya akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang melakukan pekerjaan dengan baik dan berkinerja baik untuk

bisnisnya, ia akan menerima imbalan positif dari usahanya dan menguntungkan perusahaan atau organisasinya.

Beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan pemeriksaan (audit) atas aset Pemerintah Kabupaten Bantul. Tepatnya pada 23 Februari 2022. Dari hasil pemeriksaan ini, didapati catatan aset Pemkab Bantul menjadi sorotan (Erna Sari, 2022).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, Trisna Manurung mengatakan pemeriksaan ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Sudah dilakukan sejak satu bulan yang lalu. “Ini masih pendahuluan yang sudah dilakukan sejak sebulan lalu. Jadi tidak keluar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” ujarnya saat diwawancarai Kamis (24/2). Ia menambahkan, aset di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi perhatian khusus. Sehingga terdapat beberapa catatan mengenai aset tersebut. “Yang menjadi perhatian masalah aset. Logikanya pembelanjaan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ada yang menambah aset dan ada yang tidak. Sehingga ada beberapa catatan, seperti persediaan dan catatan aset yang belum optimal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembelanjaan aset atau tidak harus sealur. Sebab hal tersebut digunakan untuk memastikan persediaan berkas sesuai dengan yang seharusnya. “Namanya pemeriksaaan ya begitu, jadi harus sealur penambahan aset atau tidaknya. Jadi pelaporan persediaan sesuai dengan berkas,” katanya. Pemeriksaan pada tahap pertama ini telah selesai dilakukan. Lebih lanjut ia menerangkan, nantinya akan dilakukan pemeriksaan kembali secara terperinci. Yaitu setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan (Erna Sari, 2022).

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Rasuli, dan Diyanto (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian dan mengganti variabel kejelasan sasaran anggaran dengan variabel komitmen organisasi. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial SKPD, diantaranya adalah komitmen organisasi. Alasan peneliti mengganti variabel lain yaitu untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai komitmen organisasi pada suatu SKPD dan memberikan temuan empiris baru agar memberikan jawaban yang

lebih valid dan rinci. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja yang tinggi pula.

Objek penelitian yang digunakan oleh Wahyuni (2014) adalah SKPD pemerintah kota Pekanbaru, sementara pada penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian pada SKPD pemerintah kabupaten Bantul. Adapun persoalan yang muncul dalam lingkungan pemerintah Pekanbaru adalah rendahnya realisasi program atau kegiatan dan lemahnya serapan anggaran. Yang mengakibatkan tingginya SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) APBD 2012 Pekanbaru yang mencapai Rp 105 Miliar. Sedangkan persoalan yang muncul dalam lingkungan pemerintah kabupaten Bantul adalah pembelanjaan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ada yang menambah aset dan ada yang tidak. Sehingga terdapat beberapa catatan, seperti persediaan dan catatan aset yang belum optimal.

Berdasarkan kondisi di atas, peneliti tertarik menguji seberapa besar pengaruh akuntabilitas publik, desentralisasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial SKPD. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Publik, Desentralisasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD (SKPD di Kabupaten Bantul).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka masalah tersebut dibatasi pada pengujian akuntabilitas publik, desentralisasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial SKPD Studi Kasus Pada SKPD di kabupaten Bantul.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Bantul?

2. Apakah desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Bantul?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD di Kabupaten Bantul?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Bantul.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Bantul.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Bantul.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini, mahasiswa dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah daerah yaitu diantaranya meliputi akuntabilitas publik, desentralisasi, dan komitmen organisasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan dalam menganalisis sistem manajemen pemerintah daerah dari segi akuntabilitas publik, desentralisasi, dan komitmen organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja manajerial pemerintah daerah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan riset bagi keilmuan.